

KAJIAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 008/PUU-III/2005 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

 Oleh: OLIVIA DESI PRIANDINI (06400197)

Law

Dibuat: 2011-02-10 , dengan 6 file(s).

Keywords: Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Undang Undang Sumber Daya Air, Conditionally Constitutional.

ABSTRAKSI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-III/2005 mengenai pengujian terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air dinyatakan ditolak. Namun dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menambahkan klausul Conditionally Constitutional yang sebelumnya belum pernah terjadi pada proses judicial review.

Penelitian ini mengambil rumusan masalah: pertama Apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 008/PUU-III/2005 mengenai pengujian terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air; kedua Bagaimana dampak hukum dari Putusan Nomor 008/PUU-III/2005 mengenai pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah UUD RI 1945; UU Sumber Daya Air; serta Putusan Mahkamah Konstitusi No.008/PUU-III/2005 sebagai bahan hukum primer, dan buku-buku serta pendapat para ahli hukum sebagai bahan hukum sekunder. Kemudian data-data tersebut dianalisa secara konten-analisis.

Dari penelitian ditemukan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keadilan substantif bagi pencari keadilan, padahal Undang-undang Sumber Daya Air belum memberikan rumusan secara jelas mengenai jaminan atas pemenuhan hak asasi atas air oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai pelaksana tanggung jawab atas kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi atas air. Dalam putusan tersebut juga ditemukan sebuah klausula tambahan berupa klausula Conditionally Constitutional yang menunjukkan sikap intervensi lembaga judisial terhadap lembaga legislatif. Sedangkan dampak hukum dari putusan tersebut adalah pencederaan terhadap konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi yang telah melakukan putusan ultra petita.

Kesimpulannya, revisi atas UU Sumber Daya Air adalah suatu kewajiban untuk menjalankan amanat konstitusi khususnya pasal 33 UUD RI 1945. Sekaligus agenda amandemen kelima atas UUD RI 1945 hendaknya merumuskan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi agar ke depan tidak ada lagi konflik yang timbul menyangkut kewenangan antar lembaga negara sebagai pemegang kendali atas integritas bangsa dan negara.

ABSTRACT

Constitutional Court Decision No. 008/PUU-III/2005 about the test on the Constitution of Water Resources declared was rejected. However, in consideration of the Constitutional Court Constitutionally conditionally add the clause that previously had never occurred in the process of judicial review.

This research took the formulation of the problem: What is the basic consideration of the Constitutional Court in No. 008/PUU-III/2005 verdict about the testing of the Law on Water Resources; second How the law impacts of Number 008/PUU-III/2005 verdict about testing Law of Water Resources for the management and utilization of Water Resources.

This research used method-normative juridical approach. Legal material used is the Court's decision No.008/PUU-III/2005 as primary legal materials, and books and opinions of jurists as secondary legal materials. Then the data were analyzed by content-analysis.

From the research found that the consideration of the Constitutional Court judges is to provide substantive justice for the seekers of justice, when the Law on Water Resources has not given a clear formulation of the collateral for the fulfillment of human rights on water provided by the Central Government and Provincial Government as the executive responsibility for the obligation to respect , protect and fulfill human rights to water. In the decision, also found an additional clause be conditionally Constitutional clause that indicates the attitude of judicial intervention against the legislative institution. While the legal effect of this decision is the violation against the constitution by the Constitutional Court which has made ultra petita decision.

In conclusion, a revision of the Water Resources Law is an obligation to carry out the mandate of the constitution, especially Article 33 of the Indonesian Constitution 1945. Hence, the agenda of the fifth amendment of 1945 Constitution of Indonesia should formulate breakthroughs made by the Constitutional Court for the future will no longer raise conflicts among agencies regarding the authority of the state as the holder control over the integrity of nation and state.

Keywords: Constitutional Court, Judicial Review, the Law on Water Resources, conditionally constitutional.